

PERANAN ANTROPOLOGI DALAM KAJIAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Oleh : *Fatiani Lase*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antropologi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep yaitu sistem administrasi negara. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasi negara masing-masing. Sistem ini tidaklah berdiri sendiri, administrasi negara pada suatu negara di dasari oleh dasar negara tersebut, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. dengan kata lain, antropologi mempengaruhi sistem administrasi negara di sebuah negara. Kondisi sosial budaya masyarakat harus dijadikan pula sebagai acuan dalam membuat kebijakan agar terdapat kesinambungan antara kebijakan dan pihak yang dijadikan sasaran serta terciptanya kerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan segala bentuk kebijakan. Ilmu antropologi itu sendiri mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. misalnya saja di masyarakat negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara para aparat di dalamnya menganut budaya profesional.

Kata kunci : antropologi dan administrasi negara

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal sekali dengan keunikannya, keanekaragamannya, kekeluarganya, kesopannya, serta kemajemukan masyarakatnya. Indonesia kini

disebut sebagai negara seribu pulau yang penuh dengan berbagai macam adat istiadat, suku bangsa, bahasa dan kebudayaan yang sangat penting sekali untuk dijaga keutuhan serta kelestariannya.

Bukan hanya kaum terpelajar, para aktivis, ataupun budayawan yang harus menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia agar tidak luntur dan musnah ditengah perkembangan zaman yang sangat cepat ini, tetapi semua orang yang ada di Indonesia harus ikut dan mencintai budaya yang ada di Indonesia. Tentu masyarakat Indonesia tidak ingin kebudayaan itu hilang perlahan-lahan seolah tak berjejak, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan tersebut sesuai dengan peran manusia didalam masyarakat.

Perkembangan zaman yang kini mulai sangat terasa dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentu sangat membuat generasi muda dan tenaga pendidik sekalipun mulai terlena akan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan memanjakan para pemakainya. Kehidupan masyarakat yang harmonis, memegang teguh nilai dan norma yang dianggap benar di masyarakat serta kehidupan yang sangat kental akan kecintaan masyarakatnya terhadap lingkungan sudah sanagat memudar. Masyarakat seolah-olah mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan bersama, buaya gotong-royong yang pernah menjadi pribadi bangsa Indonesia mulai menghilang serta tidak ada lagi rasa tenggang rasa antar masyarakat. Tentu masyarakat Indonesia menginginkan jati diri bangsa Indonesia yang dahulu sangat menjadi kebanggan Indonesia luntur begitu saja dan tidak menjadi titik perhatian oleh siapapun.

Tidak semua kemajuan dan perkembangan zaman bersifat negatif terhadap pola perilaku masyarakat. Memang sebagian masyarakat dengan mudahnya menerima budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, artinya menerima budaya-budaya asing yang dengan bebasnya masuk ke Indonesia tanpa melakukan filtrasi terhadap budaya itu. Seharusnya masyarakat harus selektif

terhadap budaya yang masuk ke Indonesia dan berfikir apakah budaya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang di pegang teguh bangsa Indonesia atau budaya tersebut dapat diterima di Indonesia sebagai tolok ukur dan meningkatkan keanekaragaman yang ada di Indonesia dalam artian masyarakat Indonesia harus mampu menonjolkan budayanya di negeri sendiri dan menunjukkannya di mata dunia serta masyarakat Indonesia harus mempertahankan budayanya dan menerima budaya baik dari dunia luar.

Batasan-batasan kemampuan manusia dalam upaya melestarikan kebudayaan tidak menjadi masalah ataupun hambatan untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan kebudayaan tidak harus melakukan sesuatu hal yang besar terhadap kebudayaan Indonesia, itu semua harus dimulai dari hal yang kecil. Generasi muda yang diharapkan dapat mampu melestarikan budaya harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, terutama para mahasiswa yang selalu di ajarkan ilmu tentang kebudayaan seperti Ilmu Budaya, Antropologi Sosial Budaya, serta ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengannya.

Lunturnya nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat dapat ditanggulangi atau setidaknya dapat dikurangi dengan meningkatkan pemahaman generasi muda dengan memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang arti penting kebudayaan serta ilmu-ilmu lain yang dapat membuka pikiran generasi muda dalam upaya melestarikan kebudayaan Indonesia. Mempelajari kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh suatu orang yang berada dalam kajian disiplin ilmu tertentu, tetapi dapat dipelajari oleh semua generasi muda tanpa memandang batasan-batasan ilmu yang dipelajari.

Suatu kebudayaan dapat dipelajari dalam sebuah tatanan ilmu yang terorganisir dan terstruktur agar dapat menjadi ilmu yang benar-benar dan didalamnya terdapat pengetahuan-

pengetahuan yang tersusun secara sistematis agar menjadi ilmu yang bersifat empiris dan teoritis untuk dipelajari mahasiswa dan generasi-generasi muda. Hal ini dapat ditemukan dalam Ilmu Antropologi yang dipelajari dalam suatu rumpun ilmu seperti Ilmu Administrasi Negara dimana Ilmu Antropologi memiliki peran di dalam rumpun ilmu tersebut.

Dengan adanya hubungan-hubungan seperti ini tentu dapat meningkatkan kemampuan generasi muda untuk mempelajari kebudayaan yang ada disekitarnya serta memiliki kemampuan yang baik untuk memahami dan mengatasi segala persoalan dengan cara yang rasional dan menggunakan sistem yang dapat diterima akal sehat. Berbekal ilmu yang telah dipelajari tentunya dapat dijadikan dasar bagi seseorang yang berkompeten serta berkepribadian mantap untuk menghadapi fenomena-fenomena yang telah atau akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berkebudayaan, politik, pengambilan keputusan dan membuat kebijakan. Tentunya mempelajari Antropologi sangat berperan dalam pelaksanaan administrasi.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antropologi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian-kajian teori dan pendapat-pendapat ahli dalam bidang antropologi.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Antropologi

Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan kini, yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu

sosial dan ilmu hayati (alam), dan juga humaniora. Antropologi berasal dari kata Yunani „Antrophos“ yang berarti "manusia" atau "orang", dan *logos* yang berarti "wacana" atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia.

Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai spesies homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas-budaya (Inggris *cross-cultural*) dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup (*worldview*) (Koentjaraningrat, 2003).

Dengan orientasinya yang holistik, antropologi dibagi menjadi empat cabang ilmu yang saling berkaitan, yaitu: antropologi biologi, antropologi sosial budaya, arkeologi, dan linguistik. Keempat cabang tersebut memiliki kajian-kajian konsentrasi tersendiri dalam kekhususan akademik dan penelitian ilmiah, dengan topik yang unik dan metode penelitian yang berbeda (Malihah dan Usman, 2011).

Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis-etnis lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, memiliki ciri fisik dan bahasa yang digunakan serupa, serta cara hidup yang sama (Sunatra dan Budimansyah, 1989).

2.2. Pengertian Ilmu Administrasi Negara

Secara etimologi administrasi berasal dari kata latin „ad“ dan „ministrare“ yang berarti melaksanakan, menerapkan, kemudian pula berarti mengendalikan. Bahasa Prancis lama menyebutnya „Administer“ yang terkadang diterjemahkan menjadi *management*. Dan dalam hal ini ensiklopedia Amerika menjelaskan bahwa administrasi adalah pengendalian atau manajemen tentang urusan-urusan eksklusif (pemerintahan). Dalam bahasa Belanda terdapat pula istilah "*Administratie*" yang diartikan sebagai pemerintahan atau yang di kalangan sarjana hukum Indonesia diartikan sebagai tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi dan manajemen dari sumberdaya seperti financial, personel dan gudang. Serta dalam bahasa Inggris Administrasi berasal dari kata *administration* atau *to administer* yang diartikan sebagai *To Manage* (mengelola) atau *To Direct* (menggerakkan) (Thoha, 2008).

Administrasi publik berarti proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan public serta administrasi publik sebagai kombinasi antara teori dan praktek yang mencampuri urusan manajemen dengan penapaian nilai-nilai normatif ditunjukkan dengan administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik (Thoha, 2008).

2.3. Kajian Ilmu Administrasi Negara

Kajian Ilmu Administrasi Negara inilah yang akan di bahas perhubungannya dengan Antropologi yang dimana Antropologi memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa kajian Ilmu Administrasi Negara :

a. Birokrasi

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata *bureau* dan *kratia* (Yunani), *bureau* artinya meja atau kantor dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi.

Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku.

b. Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak

hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar.

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

c. Organisasi dan Manajemen

Manajemen dapat di artikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Para ahli ekonomi umumnya mempunyai pengertian yang berbeda tentang manajemen.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen dapat dilakukan di

perusahaan manapun. Pada fungsi manajemen tersebut terdapat beberapa pendapat mengenai fungsi manajemen.

Menurut Henry Fayol, Fungsi manajemen adalah kegiatan *planning, organizing, commanding, coordinating dan controlling*. Berikut ini adalah garis besar dari keseluruhan teori yang telah dijabarkan di atas kita dapat menyimpulkan tiga fungsi manajemen yang sangat umum digunakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah kegiatan pertama seorang manajer dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen agar dapat membuat keputusan yang teratur dan logis sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya.

2. Pengorganisasian

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini dibutuhkan kepemimpinan (*Leadership*).

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tak kalah pentingnya, karna didalam pengawasan dilakukan koreksi. Pengawasan diperlukan untuk melihat apakah rencana dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana.

Selain manajemen adapula pengorganisasian (*Organizing*) yang menurut kamus istilah *organizing* berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian dipengaruhi oleh

hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Sedangkan pengorganisasian sendiri mempunyai arti yakni sekelompok orang yang bekerja sama dengan menempatkan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai suatu tujuan.

3. Pembahasan

3.1. Manfaat Antropologi terhadap Pembelajaran Ilmu Administrasi Negara

Pada akhir-akhir ini sarjana-sarjana antropologi membahas pula masalah-masalah administrasi Negara. Dengan demikian terjadi pula pengaruh timbal balik antara ilmu administrasi Negara dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi penting pada dewasa ini untuk mempelajari administrasi negara dalam badan-badan nasional mengingat pada umumnya warganegara dari suatu Negara terdiri dari bermacam-macam suku yang memiliki adat istiadat, watak, serta pola pikir yang berlainan.

Karena ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka dengan itu semua pemerintah dapat mengetahui kehidupan masyarakat suatu daerah dan dapat membuat suatu kebijakan publik yang tepat dan akurat. Tanpa melakukan pertimbangan yang akurat, sangat tidak mungkin suatu kebijakan akan diimplementasikan dengan baik terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu. Belum tentu semua masyarakat menerima suatu kebijakan yang sama.

Di dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep yaitu sistem administrasi negara. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasi negara masing - masing. Sistem ini tidaklah berdiri sendiri, administrasi negara pada suatu negara di dasari oleh dasar negara tersebut, tapi dipengaruhi oleh lingkungan

sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. dengan kata lain, antropologi mempengaruhi sistem administrasi negara di sebuah negara. Ilmu antropologi itu sendiri mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. misalnya saja di masyarakat negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Di sisi lain, di masyarakat negara berkembang yang cenderung lebih mengutamakan budaya kekeluargaan, budaya kekeluargaan juga akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Contohnya saja, mobil dinas malah digunakan untuk jalan - jalan keluarga. dan masih ada banyak contoh lainnya.

Partai Politik Untuk mempelajari tentang tingkah laku partai politik, kita harus mengetahui kekuatan-kekuatan serta proses-proses partai politik tersebut. Dalam hal ini bisa diambil contoh; jika dalam suatu negara berkembang seperti Indonesia, terdapat suatu partai politik berdasarkan ideologi Islam misalnya, maka cara-cara partai itu berhubungan, bersaing, atau bekerja sama dengan partai-partai lain atau kekuatan-kekuatan politik lainnya di Indonesia, tidak hanya akan ditentukan oleh norma-norma dan metode perjuangan kepartaian yang lazim. Ditambah dengan prinsip-prinsip dan ideologi agama Islam, melainkan juga oleh latar belakang, sistem norma, dan adat-istiadat tradisional dari suku bangsa dari para pemimpin atau anggota partai, yang seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan norma kepartaian dan ideologi Islam. Agar dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa itulah, maka metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ahli ilmu politik untuk mendapat pengertian tentang tingkah-laku dari partai politik yang ditelitinya.

3.2. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Administrasi Negara

Antropologi, yang sebagaimana diketahui mempelajari pola perilaku individu dalam masyarakat. Telah berulang kali ditekankan bahwa manusia merupakan unsur terpenting didalam suatu organisasi dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Jika demikian halnya secara logis jelas terlihat adanya persamaan objek kedua ilmu pengetahuan ini, hanya pendekatan dan metode analisis yang berbeda. Berikut hubungan administrasi dengan ilmu antropologi:

- a. Ilmu admisnistrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi, masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi.
- b. Ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya, masyarakat di negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional.
- c. Antropologi mempelajari tentang budaya maka, dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi yaitu, bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar.
- d. Sebagaimana pada ilmu ekonomi, didalam ilmu adsministrasi juga akan mendapatkan berbagai permasalahan apalagi masalah agrarian. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat menggunakan penelitian berdasarkan metode antropologi.
- e. Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan dengan mempergunakan analisis sejarah dan

antropologi budaya. Penggunaan analisis antropologi budaya akan melengkapi analisis sejarah.

3.3. Peran Antropologi dalam Kajian Ilmu Administrasi Negara

Antropologi dengan ilmu-ilmu bagiannya mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Hubungan ini pada umumnya bersifat timbal-balik. Antropologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu itu, dan sebaliknya ilmu-ilmu sosial yang lain juga memerlukan antropologi dalam memecahkan masalah yang dikajinya.

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.

Ilmu Antropologi Budaya adalah cabang antropologi yang berpusat pada penelitian variasi kebudayaan di antara kelompok manusia. Antropologi budaya mengumpulkan data mengenai proses ekonomi dan politik global atas budaya lokal. Hubungan antara Ilmu Administrasi Negara dengan Ilmu Antropologi Budaya terletak pada sistem ekonomi dan politik yang atas dasar budaya dalam masyarakat, dari sini seorang yang ingin mengatur administrasi negara harus memahami betul bagaimana sistem ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dan negara dan bagaimana politik itu bisa dijalankan dengan baik karena mengikuti sistem kebudayaan dalam masyarakat.

Di dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep yaitu sistem administrasi negara. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasi negara masing-masing. Sistem ini tidaklah berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. Dengan kata lain, antropologi mempengaruhi sistem administrasi negara di sebuah negara. Ilmu

antropologi itu sendiri mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara.

Di Indonesia ilmu administrasi tentu akan menghadapi masalah-masalah seperti ilmu ekonomi. Lagi pula, bahan keterangan mengenai masalah yang berhubungan dengan agraria yang kompleks dan sangat penting dalam ilmu administrasi dan hanya bisa didapatkan berdasarkan metode antropologi.

3.4. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Politik

Sangat erat pula nuntuk membahas hubungan Antropologi dengan Ilmu Politik, karena Ilmu Politik sangat besar pengaruhnya terhadap Administrasi Negara, karena manajemen puncak dari administrasi negara adalah Politik. Ketika kita membicarakan hubungan pasti ada yang menyamai akan terjadinya hubungan tersebut. Seperti halnya antropologi dan ilmu politik. Ketika di pikir-pikir ternyata ada hubungannya juga. Yang mana antropologi mempelajari tentang kebudayaan sedangkan ilmu politik mengenai pemerintahan. Seperti halnya keadaan saat ini bahwa budaya politik di masa lalu dan di masa sekarang tentunya beda sekali. Maka dari itu disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih hubungan antropologi dan ilmu politik itu. Ilmu politik sejak tahun 1960 telah meluaskan perhatiannya dari pokok semulanya, yaitu hubungan antara kekuatan-kekuatan serta proses-proses politik berbagai negara dengan berbagai macam sistem pemerintahan, ke masalah-masalah yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan-kekuatan politik tersebut. Hal itu penting terutama bila seorang ahli ilmu politik harus meneliti dan menganalisis kekuatan-kekuatan politik di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Oseania.

Kalau dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ada suatu partai politik berdasarkan ideologi

agama Islam, misalnya, maka cara-cara partai itu berhubungan, bersaing, atau bekerja sama dengan partai-partai atau kekuatan-kekuatan politik lainnya di Indonesia, tidak hanya ditentukan oleh norma-norma dan metode dan ideologi agama Islam, tetapi juga latar belakang, sistem norma, dan adat-istiadat tradisional suku bangsa para pemimpin atau anggota partai yang sering kali menyimpang dari ketentuan-ketentuan norma kepartaian dan ideologi Islam.

Untuk dapat memahami latar belakang dan adat-istiadat tradisional dari suku bangsa itulah, maka metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ahli ilmu politik, untuk mendapat pengertian mengenai tingkah laku dari partai politik yang sedang dipelajarinya. Seorang ahli antropologi dalam mempelajari suatu masyarakat untuk menulis sebuah deskripsi etnografi tentang masyarakat tersebut tentu akan juga menghadapi sendiri kekuatan dan proses politik lokal serta aktivitas dari cabang-cabang partai politik nasional disitu. Untuk menganalisis gejala-gejala itu perlu mengetahui konsep-konsep dan teori-teori ilmu politik juga.

Dengan kata lain dalam menyelidiki aspek kebudayaan di masa lalu dan masa kini. Antropologi yang sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Yang mana hasil penyelidikan kebudayaan di masa lalu meliputi semua aspek kebudayaan masyarakat termasuk politik itu sendiri seperti pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga politik yang menjadi konsep antropologi budaya sebagaimana dikembangkan Ralph Tipton dan sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan suatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.

Hubungan yang paling erat antara Ilmu Antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan didesa-desa dan dipedalaman.

Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peranan-peranan dan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Hasil penyelidikan antropologi yang menyangkut aspek cultural termasuk dalam gagasan dan lembaga politik yang dapat menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan politik. Dalam bidang teori antropologi, khususnya dalam menunjukkan perbedaaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat. penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya. Agar dapat mengetahui Latar Belakang Adat istiadat tradisional dari suku bangsa itulah maka metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ilmu politik untuk mendapatkan pengertian tentang tingkah laku partai politik yang ditelitinya.

4. Kesimpulan

Di dalam ilmu administrasi negara, dikenal suatu konsep yaitu sistem administrasi negara. Setiap negara pasti memiliki sistem administrasi negara masing-masing. Sistem ini tidaklah berdiri sendiri, administrasi negara pada suatu negara di dasari oleh dasar negara tersebut, tapi dipengaruhi oleh lingkungan

sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. Dengan kata lain, antropologi mempengaruhi sistem administrasi negara di sebuah negara.

Kondisi sosial budaya masyarakat harus dijadikan pula sebagai acuan dalam membuat kebijakan agar terdapat kesinambungan antara kebijakan dan pihak yang dijadikan sasaran serta terciptanya kerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan segala bentuk kebijakan. Ilmu antropologi itu sendiri mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya saja di masyarakat negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional.

Daftar Pustaka

- Supardan, Dadang. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Malihah E, dan Kolip Usman. 2011. *Pengantar Antropologi*. Bandung : CV. Maulana Media Grafika.
- Sunarno, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sunatra dan Budimansyah, D. 1989. *Sosiologi dan Antropologi*. Bandung : CV Epsilon Grup.
- Soelaeman, Munandar. 2010. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.